

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 12  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2020  
Waktu : 09.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas:

1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020;
2. RKA K/L Tahun 2021;
3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI; dan
4. Isu-isu Aktual lainnya.

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 40 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Kuasa Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);

6. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Ir. Agus Dermawan, M.Si. (Kuasa Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
10. Berny Achmad Subki, S.T., M.Sc. (Kuasa Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).
11. Fatah Setiawan Topobroto, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Persero); dan
12. Farida Mokodompit, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, RKA K/L Tahun 2021, Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual lainnya, dibuka pukul 09.30 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 per 11 September 2020 sebesar Rp2.767.232.120.899,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 54,44% dari pagu anggaran sebesar Rp5.082.831.010.000,00 (lima triliun delapan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sepuluh ribu rupiah). Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran Tahun 2020 secara optimal, agar masyarakat sektor kelautan perikanan dapat merasakan kehadiran Bantuan Pemerintah secara cepat, sesuai dengan target dan harapan di masa pandemi COVID-19.

2. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar **Rp6.652.139.393.000,00** (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp86.767.955.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  - d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah);
  - e. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.078.052.922.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - f. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);
  - g. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - h. **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.522.573.626.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
  - i. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp603.719.656.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebesar **Rp3.486.000.000.000,00** (tiga triliun empat ratus delapan puluh enam miliar rupiah), dengan rincian:
  - a. Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.451/MEN-KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3.286.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah) yang

peruntukannya, antara lain untuk merealisasikan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

- b. Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.326/MEN-KP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) yang peruntukannya untuk Sarana prasarana Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) dan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.
4. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar **Rp1.000.000.000.000,00** (satu triliun rupiah) dengan rincian:
- a. DAK Provinsi, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
  - b. DAK Kabupaten/Kota, sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahan terkait pemilihan menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 dari Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Komisi IV DPR RI, selambat-lambatnya awal bulan Desember 2020.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

Kuasa Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

**Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151